

## Analisis Pendapatan Dan Belanja Daerah

Meilani Putri <sup>1</sup>, Siti Fatimah <sup>2</sup>, Salwa Lailani <sup>3</sup>, Putri Kemala Dewi Lubis <sup>4</sup>, Khairani Alawiyah Matondang <sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kode Pos 20221

E-mail: [meyppt@gmail.com](mailto:meyppt@gmail.com)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6109>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 29 Maret 2026

Revised: 2 April 2026

Accepted: 15 April 2026

#### Kata Kunci:

Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, APBD

#### Keywords:

Regional Revenue, Regional Expenditure, Local Budget



### ABSTRACT

Pendapatan dan belanja daerah merupakan komponen utama dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan kegiatan pemerintahan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan belanja daerah digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan dan belanja daerah serta mengkaji hubungan keduanya dalam mendukung pembangunan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai teori serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih menjadi tantangan, yang ditandai dengan rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, struktur belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja operasional menunjukkan bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan

*Regional revenue and expenditure are the main components in the management of local government finances and play an important role in supporting development implementation and improving public welfare. Regional revenue serves as the primary source of funding for government activities, consisting of local own-source revenue, intergovernmental transfers from the central government, and other legitimate revenues, while regional expenditure is used to finance various development programs and public services. This study aims to analyze regional revenue and expenditure and examine their relationship in supporting regional development. The research method used is qualitative with a literature study approach, utilizing secondary data obtained from relevant books and scientific journals. The data analysis technique is carried out by reviewing, comparing, and interpreting various theories and findings from previous studies. The results show that the level of regional fiscal independence remains a challenge, indicated by the low contribution of local own-source revenue and the high dependence on central government transfers. In addition, the structure of regional expenditure, which is still dominated by operational spending, indicates that budget allocation has not been fully optimized in supporting economic growth. Therefore, better management of regional revenue and expenditure that is effective, efficient, transparent, and*

*accountable is required to improve local government financial performance and support sustainable development.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Meilani Putri el at (2026). Analisis Pendapatan Dan Belanja Daerah <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6109>

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berperan dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencerminkan seluruh pendapatan dan belanja dalam satu periode anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta lain-lain pendapatan yang sah. Menurut Halim (2004), pendapatan daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri, sementara Nordiawan (2010) menegaskan bahwa rendahnya kontribusi PAD menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer, yang mencerminkan rendahnya kemandirian fiskal daerah.

Di sisi lain, belanja daerah merupakan bentuk penggunaan anggaran untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, yang mencerminkan prioritas kebijakan pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2018), pengelolaan belanja daerah harus dilakukan secara efisien dan efektif agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasional, seperti belanja pegawai, sehingga belum sepenuhnya mendukung kegiatan yang produktif. Selain itu, permasalahan seperti inefisiensi anggaran, program yang kurang tepat sasaran, serta lemahnya pengawasan masih menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Bastian (2010), penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap pendapatan dan belanja daerah guna menilai efektivitas pengelolaannya serta kontribusinya dalam mendukung pembangunan daerah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep, teori, serta hasil penelitian sebelumnya terkait pendapatan dan belanja daerah.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara menganalisis, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai teori dan hasil penelitian sebelumnya sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan pendapatan dan belanja daerah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan daerah merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan keuangan suatu daerah. Tingkat pendapatan daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menggali potensi ekonomi yang dimilikinya. Menurut Halim (2004), semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut. Namun, dalam praktiknya, banyak daerah di Indonesia masih menghadapi permasalahan rendahnya kontribusi PAD. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, kurang optimalnya pengelolaan potensi daerah, serta rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Kondisi ini menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut Nordiawan (2010), ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal daerah. Dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK) memang memiliki peran penting dalam membantu daerah membiayai pembangunan. Namun, ketergantungan yang berlebihan dapat mengurangi fleksibilitas daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan. Selain itu, kondisi ini juga dapat menimbulkan kecenderungan kurangnya inovasi dalam menggali sumber pendapatan daerah.

Di sisi lain, belanja daerah merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan publik. Belanja daerah digunakan untuk membiayai berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurut Mardiasmo (2018), pengelolaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis (*value for money*).

Permasalahan yang sering terjadi adalah struktur belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja operasional, terutama belanja pegawai, dibandingkan dengan belanja modal. Belanja operasional cenderung tidak memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, belanja modal memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi karena berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik.

Menurut Bastian (2010), pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan belanja yang bersifat produktif. Belanja produktif dapat memberikan efek multiplier terhadap perekonomian daerah, seperti meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, hubungan antara pendapatan dan belanja daerah juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan yang tinggi tidak selalu diikuti dengan pengelolaan belanja yang baik. Dalam beberapa kasus, peningkatan pendapatan justru tidak diiringi dengan peningkatan kualitas belanja, sehingga anggaran tidak digunakan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan anggaran lebih penting dibandingkan dengan jumlah anggaran itu sendiri. Permasalahan lain yang sering terjadi adalah inefisiensi dalam penggunaan anggaran. Inefisiensi ini dapat berupa pemborosan anggaran, program yang tidak tepat sasaran, serta lemahnya pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pengendalian anggaran masih perlu diperbaiki.

Transparansi dan akuntabilitas juga merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Darise (2008), transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam penerapan kedua prinsip tersebut, seperti keterbatasan akses informasi dan lemahnya sistem pengawasan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Sinambela & Pohan, 2023). Selain itu, Zhahira dan Ichsan (2023) menyatakan bahwa analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan APBD. Lubis dan Ichsan (2023) juga menegaskan bahwa perencanaan anggaran yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan APBD.

Dengan demikian, pengelolaan pendapatan dan belanja daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah anggaran, tetapi juga pada kualitas pengelolaannya. Pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi dalam menggali PAD, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, serta mengalokasikan belanja secara lebih efektif dan produktif.

## **SIMPULAN**

Pendapatan daerah merupakan komponen utama dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan daerah dalam mengelola potensi ekonominya. Namun, dalam praktiknya masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang menunjukkan bahwa optimalisasi sumber pendapatan daerah belum sepenuhnya berjalan secara maksimal.

Belanja daerah merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan kebijakan publik yang mencerminkan prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, struktur belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja operasional, khususnya belanja pegawai, menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran belum sepenuhnya diarahkan pada kegiatan yang produktif. Selain itu, berbagai permasalahan seperti inefisiensi anggaran, program yang kurang tepat sasaran, serta lemahnya pengawasan menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, pengelolaan pendapatan dan belanja daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah anggaran, tetapi juga pada kualitas pengelolaannya. Oleh karena itu, pemerintah

daerah perlu meningkatkan inovasi dalam menggali potensi PAD, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, serta mengalokasikan belanja secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan keuangan daerah dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Ibu Dosen yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penulisan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyediakan referensi serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca.

#### **REFERENSI**

- Halim, A. (2004). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.  
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.  
Nordriawan, D. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.  
Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPF.  
Darise, N. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks.  
Sinambela, E., & Pohan, M. (2023). Analisis pendapatan dan belanja daerah.  
Zhahira, C. R., & Ichsan, R. (2023). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.  
Lubis, P., & Ichsan, R. (2023). Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah.  
Saragih, J. (2018). Analisis kinerja keuangan daerah dalam pengelolaan APBD.